

PETA DASAR POTENSI GURU BK / KONSELOR SLTA DI JAWA TENGAH

Imam Tadjri

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Abstrak : Masalah utama dalam penelitian ini adalah belum adanya peta dasar tentang potensi Guru BK / Konselor SLTA di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peta Dasar Potensi Guru BK / Konselor SLTA di Jawa Tengah. Penelitian dikenakan kepada sejumlah Guru BK/Konselor di SMA. Pengumpulan data dilakukan dengan Angket dan dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasilnya menunjukkan: (1) Jumlah Konselor Wanita lebih banyak dari konselor pria, (2) pendidikan mereka umumnya Sarjana S1 tapi sebagian kecil mereka telah mencapai pendidikan setingkat S2 dan S3, (3) pangkat dan golongannya sebagian besar telah mencapai Pembina/IV-a, (4) kegiatan profesional yang diselenggarakan umumnya masih dalam batas minimal. Rekomendasi yang diajukan: 1. Setiap Kandep Diknas Kota di Jawa Tengah agar: Menyusun peta dasar potensi guru BK/Konselor SLTA dengan benar, 2. Untuk penelitian lanjut agar melakukan penelitian dengan tema sama pada sampel yang lebih banyak.

Kata kunci: *peta dasar, potensi guru bk/konselor.*

Keberadaan Program Bimbingan dan Konseling Sekolah (Selanjutnya disingkat Program BK) secara resmi menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah sejak berlakunya Kurikulum 1975. Sejak saat itu program BK berkembang dengan segala pasang surutnya sampai terbitnya Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) sekarang ini sehingga program BK di sekolah dikenal dengan Program BK KTSP. Dalam pelaksanaannya Program BK KTSP difokuskan pada layanan pengembangan diri suatu layanan untuk tujuan menumbuh kembangkan kompetensi siswa sesuai dengan potensinya masing-masing (Mulyasa.2005:96).

Konselor (Guru Pembimbing) sebagai profesional yang berwenang dan bertanggungjawab atas terselenggaranya layanan program BK di sekolah dituntut untuk selalu meningkatkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju agar mutu layanannya dapat dipertanggung jawabkan secara profesional. Budaya memelihara mutu penting dan baik untuk dimiliki oleh para konselor di sekolah (Zi Orga. 2007: 136) agar kegiatan profesinya mendapat penghargaan yang sesuai dari masyarakat maupun pemerintah.

Ini merupakan harapan dimasa mendatang sebagaimana diamanatkan oleh perundangan bahwa "Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Sosok utuh

kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan” (Permendiknas RI No. 27 Tahun 2008).

Sebagai profesional konselor senantiasa dituntut untuk mampu mengembangkan dan memperluas mutu kinerja profesional dalam berbagai kesempatan. Menegakkan budaya mutu (*quality culture*) itu sendiri pada hakekatnya merupakan sebuah sistem perilaku yang dikonstruksi dari suatu kaidah, prinsip, konsep, dan filosofi keilmuan. Sistem perilaku ini harus ditampilkan oleh pengemban profesi dalam pelaksanaan tugas profesionalnya sehingga dapat memberi manfaat khas kepada pihak-pihak yang dilayani dan pihak yang berkepentingan lainnya (Satiro, 2000 dalam Taufiq, A. 2009).

Upaya peningkatan profesi dan regulasi profesi konselor SMA di Jawa Tengah sampai saat ini belum ada data yang pasti. Bila menilik data pada Uji Portofolio Guru Pembimbing/Konselor di Rayon 12 UNNES nampak bahwa umumnya Guru BK/Konselor sangat minim sekali memiliki pengalaman mengikuti kegiatan peningkatan profesi. Belum tentu Guru BK/Konselor SMA di Jawa Tengah dalam satu semester memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan semacam penataran, lokakarya, pelatihan, seminar dan sebagainya.

Apabila hal tersebut dibiarkan terus, maka sebenarnya merupakan suatu pemborosan sumber daya manusia profesi konseling. Ini merupakan pertanda yang kurang produktif dalam sistem manajemen sekolah. Karena ada potensi yang sangat penting tetapi tidak diberdayakan. Padahal kalau potensi guru BK/Konselor di SLTA dapat diberdayakan secara maksimal di samping sekolah akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dan bermanfaat misalnya dalam menumbuh kembangkan kesejahteraan mental siswa (dan juga guru) sekarang maupun untuk masa mendatang, masyarakat juga bisa merasakan bahwa investasi dan potensi yang ada di sekolah memberi dampak positif untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karena pada akhirnya siswa yang telah selesai belajar di SMA akan kembali kepada masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas masalah utama yang diungkap dirumuskan menjadi” Bagaimana sebenarnya kondisi faktual potensi Guru Pembimbing / Konselor SLTA di Jawa Tengah?”. Tujuan penelitiannya adalah tersusunnya peta dasar potensi Guru Pembimbing / Konselor SLTA di Jawa Tengah.

Pembangunan di negara kita dalam Sektor Pendidikan selalu memperoleh perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Meski demikian pemerintah menyadari bahwa apa yang disediakan untuk kelangsungan pendidikan di negara kita belumlah menunjukkan hasil-hasil sebagaimana yang kita harapkan. Dalam Tahun Pertama

Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua misalnya, Sektor Pendidikan hanya memperoleh anggaran sekitar 4 % dari seluruh anggaran belanja negara (RAPBN), jauh di bawah prosentase yang diperoleh sebesar 11 % dari APBN Pembangunan Jangka Panjang Akhir Tahap Pertama (Kompas: Catatan Akhir Tahun. 21 Des. 2006).

Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan di negara kita perlu melakukan efisiensi yang sangat tinggi untuk tetap dapat melaksanakan pembangunan sektor pendidikan. Di samping itu perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dunia Usaha atau lembaga-lembaga perekonomian tentu sangat berkepentingan sekali untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di negeri kita.

Perubahan masyarakat sebagai akibat pesatnya perkembangan dan temuan-temuan Ipteks, menuntut semua sektor kehidupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Termasuk di dalamnya, keberadaan sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, karena pada dasarnya sekolah itu berasal dari masyarakat (Hadi Supeno 2003:14). Pelayanan pendidikan dipusatkan kepada kebutuhan anak didik. Oleh karena itu pendidik (guru) sebagai pelaksana layanan pendidikan di sekolah-sekolah merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Di sisi lain Guru sebagai pemegang amanat masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, harus mampu melaksanakan amanatnya sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Ini memang ironis dan berat bagi guru sendiri. Karena selain dirinya harus mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru, pada saat yang bersamaan harus pula melaksanakan amanat masyarakat. Padahal dalam masa perubahan masyarakat, kemungkinan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai antara keluarga, masyarakat dan sekolah sangat mungkin terjadi. Sehingga sangat mungkin pula Guru bekerja dalam lingkungan-lingkungan nilai yang berbeda satu dengan lainnya.

Inilah yang secara sadar atau tidak Guru tentu harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Karena apabila itu tidak dilakukan, apa yang dilakukan Guru terhadap anak didiknya sama dengan “pembongkaran” atau “pembodohan” terhadap generasi muda, yang pada akhirnya akan menghasilkan generasi muda yang lemah, generasi muda yang tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam mengisi kesempatan (Tilaar 2004:198).

Ditemukannya metode-metode pembelajaran yang mutakhir serta munculnya media pembelajaran yang canggih, untuk penerapannya di sekolah memerlukan tenaga-tenaga yang profesional dan trampil. Tenaga guru yang ada dewasa ini dipandang masih perlu memperoleh tambahan ilmu atau ketrampilan sesuai dengan perkembangan Ipteks dalam pembelajaran (Fatah, N 2000:87). Karena apabila guru yang dewasa ini berada disekolah tidak dikenalkan dengan ide-ide baru yang muncul dalam dunia pendidikan, atau tidak dikenalkan dengan metode-metode mutakhir dalam pembelajaran, maka apa yang

dilakukan guru di sekolah tidak akan pernah sampai kepada tujuan pendidikan yang diinginkan sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan Nasional.

Dengan temuan-temuan baru di bidang pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran ini, di samping adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas setiap pelayanan, maka sudah seharusnya para guru dan tenaga kependidikan lainnya berupaya untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan mutakhir di bidang pendidikan tersebut. Karena apabila guru dan tenaga kependidikan lainnya terjebak dalam pekerjaan rutin, pada akhirnya tujuan pendidikan dan mutu pendidikan tidak dapat diandalkan sebagai upaya pencerdasan bangsa.

Tidak dapat dipungkiri memang, bahwa kemampuan Guru untuk meningkatkan diri dengan biaya sendiri merupakan suatu hal yang langka. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan untuk memberi kesempatan dan biaya bagi guru yang berminat dan bersemangat untuk meningkatkan kualitas dirinya. Meski dengan anggaran yang terbatas, Pemerintah sudah banyak melakukan program-program dan proyek-proyek peningkatan mutu Guru, sejak dari Guru SD sampai Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bahkan juga Perguruan Tinggi.

Program Peningkatan Guru Setara D2 (Diploma Dua) misalnya sudah, sudah dilakukan Pemerintah sejak Tahun 1980 an untuk guru-guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertamam dan Guru-guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Program-program penyetaraan guru-guru SD untuk pendidikan setara D2 secara gencar baru dilakukan sekitar Tahun 1990an. Ini merupakan usaha pemerintah untuk membantu guru-guru SD menyesuaikan diri dalam penggunaan metode-metode baru pembelajaran.

Guru profesional dengan karakteristik : (1) menguasai bahan pembelajaran, (2) mampu mengelola kelas , (3) menguasai sumber/media pembelajaran, (4) penguasaan landasan pendidikan, (5) mampu mengelola interaksi PBM, (6) mampu mengelola program belajar-mengajar, (7) mampu menyelenggarakan administrasi sekolah, (8) mampu berpartisipasi dalam program BK, (9) serta mampu memahami prinsip-prinsip, malaksanakan dan menafsirkan hasil-hasil penelitian, pada pendidikan modern ini harus dapat ditegakkan dan dikukuhkan pada setiap guru. Dengan seperangkat kompetensi tersebut guru profesional seharusnya menyadari bahwa peningkatan yang terus-menerus atas kualifikasi profesinya merupakan suatu kewajiban (Nanang Fatah 2000:7). Dengan demikian, profesi sebagai guru yang ditekuni tidak dirasakan sebagai suatu profesi yang mandeg, rutin, tidak kompetitif dan tidak prospektif dapat dihindari pada diri setiap guru (Dedy Supriyadi 1998:134).

Guru sebagai profesional memang mempunyai kewajiban terhadap pengembangan dan peningkatan profesinya agar profesi yang disandangnya tidak dinilai sebagai profesi yang mati (Correy, G. 1986:221). Bagaimanapun, sebagai profesional harus memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan-pendidikan lanjut atau pendidikan singkat dalam rangka peningkatan dirinya; dan ini harus didukung oleh

masyarakat khususnya masyarakat sekolah itu sendiri; dengan demikian akan berarti memaksimalkan investasi yang diberikan kepada dunia pendidikan (Tilaar 1992:97).

Masyarakat seharusnya memang memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan mutu Guru. Karena Guru merupakan pemegang amanat masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (C. Beby 1880:135). Konsekuensinya, masyarakat seharusnya selalu mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasinya, sehingga pada gilirannya pelaksanaan amanat yang diembankan kepada pendidikan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Karena hasil yang diperoleh para guru dalam peningkatan mutu kinerjanya pada akhirnya akan tercurah pada masyarakat.

Mencetak guru profesional bukan semata-mata tanggung jawab LPTK sebagai lembaga yang memproduksi guru, tetapi juga masyarakat khususnya masyarakat sekolah sebagai lembaga pengguna produksi LPTK (Imam Tadjri, 2006:6). Dengan demikian perlu adanya kerjasama kemitraan antara LPTK dengan sekolah yang dapat mengembangkan kedua-dua belah pihak yang saling menguntungkan. Di satu sisi LPTK menyediakan format-format pendidikan calon guru profesional, pada sisi lain secara bersama-sama, masyarakat dan sekolah khususnya mengevaluasi kinerja lulusan LPTK yang telah berada di lapangan, dan kemudian memberikan informasi kepada LPTK untuk perbaikan dan pengembangan proses pencetakan guru.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia umumnya, UNNES melaksanakan salah satu misinya yaitu menyelenggarakan program-program kependidikan. Ini merupakan komitmen UNNES dalam melayani masyarakat. Program ini diselenggarakan berdampingan dengan seluruh jurusan yang ada saat ini, mulai dari program Diploma Dua (D2) sampai ke program Pascasarjana.

Untuk melayani masyarakat yang berada jauh dari Kampus Induk UNNES, khususnya guru-guru yang membutuhkan sekali adanya layanan pendidikan lanjut, atas permintaan guru-guru, masyarakat dan pimpinan-pimpinan daerah bersangkutan didukung dengan semangat otonomi daerah, dan juga untuk mengantisipasi terselenggaranya pendidikan yang berbiaya murah dengan kualitas yang tetap terjamin, UNNES mendirikan kelas-kelas jauh. Kebijakan ini ternyata memperoleh sambutan yang sangat antusias. Ini terbukti dari tingginya animo masyarakat terhadap kelas-kelas Jauh UNNES yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

METODE

Populasi penelitian ini adalah Guru BK/Konselor SLTA di Jawa Tengah dengan sampel Guru BK/Konselor SMA Negeri yang ada di wilayah Kota Semarang dan Kota Tegal sejumlah 85 orang. Variabel penelitiannya adalah peta dasar potensi guru BK/Konselor. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket (terbuka-tertutup) yang disusun berdasarkan tujuan dan variabel penelitian. Penyelenggaraan angket dilakukan dengan cara menyampaikan langsung kepada

responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan rumus prosentase rata-rata hitung $(f : N) \times 100$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan potensi dasar Guru BK/Konselor SMA di Jawa Tengah menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang beragam. Lebih banyaknya konselor wanita di SMA menunjukkan bahwa profesi konselor lebih disukai oleh kaum wanita. Ini karena profesi konselor membutuhkan mereka yang memiliki sikap keibuan yang penuh kasih sayang, terasa melindungi, sabar dan tekun (Winkel, 1991). Kemungkinan lainnya adalah ketersediaan tenaga kerja di Jawa Tengah di mana jumlah penduduk wanita mencapai 52 % dibanding dengan penduduk pria yang hanya mencapai 48 % (BPS Jateng, 2006). Artinya jumlah konselor SMA di Jawa Tengah mengikuti pola jumlah penduduknya yaitu bahwa penduduk wanita lebih banyak dari penduduk pria sehingga jumlah konselor wanita lebih banyak wanita daripada konselor pria.

Dari segi latar pendidikan Guru BK/Konselor SMA di Jawa Tengah sebagian dari mereka telah berhasil mencapai jenjang pendidikan Magister bahkan sebagian kecil lainnya telah mencapai pendidikan Doktor. Ini tentu merupakan hal yang baik karena di samping membuka wawasan akademis juga merupakan upaya untuk menjaga mutu layanannya (Zi Orga, 2004). Memberi kesempatan kepada Guru untuk mengikuti pendidikan lanjut pada hakekatnya adalah meningkatkan mutu kinerja baik kepada siswa maupun masyarakat pada umumnya (Neugrug, 2007:294).

Pendidikan tambahan yang pernah diikuti oleh Guru BK/Konselor SMA di Jawa Tengah adalah pendidikan tambahan singkat sekitar 3 bulan sampai 1 tahun. Temuannya menunjukkan bahwa mereka yang menerima pendidikan tambahan umumnya adalah konselor wanita. Ini menunjukkan konselor wanita lebih bersemangat dalam mengambil kesempatan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu kinerjanya. Untuk itu sinyalemen yang mengatakan bahwa tenaga kerja wanita kurang bersemangat untuk mengikuti pendidikan tambahan (Supriadi, D. 1994) terbantahkan oleh hasil penelitian ini. Karena ternyata konselor wanita di daerah penelitian ini menunjukkan semangat yang lebih baik untuk mengikuti pendidikan tambahan dibanding dengan konselor pria.

Kegiatan profesional yang dilakukan oleh Guru BK/Konselor SMA di Jawa Tengah cukup beragam terutama kegiatan profesional yang bersifat layanan individual. Kegiatan profesional yang berupa layanan kelompok tampaknya masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi karena layanan kelompok baik dalam layanan bimbingan maupun konseling dapat meningkatkan kinerja konselor dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi program BK di sekolah.

Pembahasan

Temuan-temuan di atas mengindikasikan perlunya disusun potensi dasar Konselor SMA agar dapat diketahui gambaran sebenarnya potensi yang dimiliki oleh konselor SMA di Jawa Tengah dan untuk keperluan pemberian regulasi profesi secara tepat sehingga mutu kinerja konselor SMA di Jawa Tengah dapat merata keseluruh wilayah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:(1) Jumlah Konselor Wanita lebih banyak dari konselor pria, (2) Pengalaman kerja konselor umumnya sudah mencapai 15 tahun, (3) Pendidikan mereka sebagian besar Sarjana S1, sebagian lainnya berpendidikan S2 dan sebagian kecil telah mencapai pendidikan setingkat S3, (4) Mereka sangat jarang memperoleh pendidikan tambahan dan mereka yang mendapat pendidikan tambahan singkat umumnya adalah konselor wanita, (5) Pangkat dan golongan konselor SLTA di Jawa Tengah sebagian besar telah mencapai Pembina/IV-a, dan, (6) Kegiatan profesional yang diselenggarakan umumnya masih dalam batas minimal dan mereka sangat sedikit sekali menyelenggarakan layanan bimbingan atau konseling kelompok.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka disarankan: (1) Setiap Kandep Diknas Kota agar menyusun Peta Dasar Potensi Guru BK/Konselor SLTA dengan benar, (2) Kandep Diknas Kota atau pihak yang berwenang agar memberikan kesempatan yang lebih luas dan dengan meningkatkan frekuensi bagi Guru BK/Konselor SLTA untuk mengikuti kegiatan ilmiah, (3) bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan regulasi profesi konseling agar dilakukan dengan tepat dan merata kepada seluruh konselor SLTA secara rutin, (4) konselor SLTA di lapangan agar aktif mengikuti kegiatan-kegiatan untuk regulasi profesi, (5) untuk penelitian lanjut agar melakukan penelitian dengan tema yang sama pada sampel yang lebih banyak.

DAFTAR RUJUKAN

E, Neugrug. 2007. *The World of the Counselor: An Introduction to the Counseling Profession*. Australia: Book Cole.

Furchan, Arief. 1984. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Makmun, Abin Syamsudin. 2000. *Psikologi Pendidikan*. Bandung:Rosda.

Prayitno. 1994. *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: Depdikbud-Dikti.

- Satmoko, Retno Sriningsih. 1999. *Landasan Kependidikan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- _____. 2000. *Statistika Inferensial*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sudjana, Nana, dkk. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. 2000. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, D. 1994. *Kreativitas, Kebudayaan, dan Perkembangan Iptek*. Bandung: Alfabeta.
- Surya. 1989. *Pengajaran Remedial*. Bandung: Rosda.
- Tilaar. 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Karya Offset.
- Winkel. 1991. *Bimbingan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Zi, O. 2004. *The School Supervision*. Singapore: Book Cole.